

3.1.1.6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial tahun 2024 dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 8.011.486.370 dan realisasi keuangan Rp 7.610.971.460 atau 95,00 %.

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan OPD pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dengan melaksanakan 6 program, 11 kegiatan dan 30 sub kegiatan. Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Anggaran dan Realisasi pada APBD 2024 terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial pada Dinas Sosial

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	DINAS SOSIAL	8.011.486.370	7.610.971.460
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.290.982.642	4.044.950.583
1.06.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.969.878.086	3.729.643.306
1.06.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.969.878.086	3.729.643.306
1.06.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	70.109.360	69.989.525
1.06.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.499.000	1.499.000
1.06.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.773.860	10.773.000
1.06.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.901.500	2.901.500
1.06.01.2.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	4.970.000	4.969.900
1.06.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.965.000	49.846.125
1.06.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.600.000	5.600.000
1.06.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin	5.600.000	5.600.000
1.06.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.500.000	19.173.802
1.06.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.500.000	19.173.802
1.06.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	220.895.196	220.543.950

1.06.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.275.000	80.196.351
1.06.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.420.000	1.418.400
1.06.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	139.200.196	138.929.199
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	429.923.200	418.566.461
1.06.02.2.03	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	429.923.200	418.566.461
1.06.02.2.03.0001	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	250.238.400	245.706.000
1.06.02.2.03.0002	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	79.684.800,	79.684.800
1.06.02.2.03.0004	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000,	93.175.661
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	2.404.448.800	2.317.088.241
1.06.04.2.01	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Penge is di Luar Panti Sosial	1.035.489.000	998.663.033,
1.06.04.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	83.000.000	82.575.714
1.06.04.2.01.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	28.480.000	25.691.911
1.06.04.2.01.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	29.090.000,	25.355.628
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	27.826.000	25.357.314
1.06.04.2.01.0008	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	837.750.000	814.375.266
1.06.04.2.01.0012	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	29.343.000	25.307.200
1.06.04.2.02	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1.368.959.800	1.318.425.208
1.06.04.2.02.0007	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	463.959.900	429.567.237
1.06.04.2.02.0008	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	872.994.900	864.819.325
1.06.04.2.02.0010	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	32.005.000	24.038.646
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	370.565.100	365.484.009
1.06.05.2.02	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	370.565.100	365.484.009

1.06.05.2.02.0001	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	39.988.400	39.771.546
1.06.05.2.02.0003	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	330.576.700	325.712.463
1.06.06	Program Penanganan Bencana	495.566.628	445.382.166
1.06.06.2.01	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	495.566.628	445.382.166
1.06.06.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	215.522.728	180.698.304
1.06.06.2.01.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	187.944.000	186.469.764
1.06.06.2.01.0004	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	16.420.000	4.175.000
1.06.06.2.01.0005	Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	75.679.900	74.039.098
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	20.000.000	19.500.000
1.06.07.2.01	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	20.000.000	19.500.000
1.06.07.2.01.0001	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	20.000.000	19.500.000

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi, serta keluaran dan capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan rincian sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.969.878.086 dan realisasi keuangan Rp 3.729.643.306 atau 93,95 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dengan capaian kinerja berupa 37 orang/bulan.

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1,499.000 dan realisasi keuangan Rp 1.499.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Alat Listrik yang diadakan dengan capaian kinerja berupa 6 paket.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10.773.860 dan realisasi keuangan Rp 10.773.000 atau 99.99 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor dan Alat Kebersihan yang diadakan dengan capaian kinerja berupa 12 paket.

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.901.500 dan realisasi keuangan Rp 2.901.500 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah paket barang cetak dan penggandaan dengan capaian kinerja berupa 12 paket.
- d. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.970.000 dan realisasi keuangan Rp 4.969.900 atau 100 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu dengan capaian kinerja berupa 12 laporan.
- e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp 49.965.000 dan realisasi keuangan Rp 49.846.125 atau 99.76 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan capaian kinerja berupa 40 laporan.

3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.600.000 dan realisasi keuangan Rp 5.600.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan dengan capaian kinerja berupa 2 unit.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp 24.500.000 dan realisasi keuangan Rp 19.173.802 atau 78.26 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan dengan capaian kinerja berupa 12 laporan.

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 80.275.000 dan realisasi keuangan Rp 80.196.351 atau 99.90 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya dengan capaian kinerja berupa 5 unit.
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.420.000 dan realisasi keuangan Rp 1.418.400 atau 99.89 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan capaian kinerja berupa 2 unit.

- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp 139.200.196 dan realisasi keuangan Rp 138.929.199 atau 99.81 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dengan capaian kinerja berupa 1 unit

II. Program Pemberdayaan Sosial

1. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten /Kota

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp 250.238.400 dan realisasi keuangan Rp 245.706.000 atau 98.19 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja berupa 80 orang PSM.
- b. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp 79.684.800 dan realisasi keuangan Rp 79.684.800 atau 100 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya kewenangannya Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja berupa 13 orang TKSK.
- c. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp 100.000.000 dan realisasi keuangan Rp 93.175.661 atau 93.18 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota yaitu bimtek LKKS dan bantuan Usaha Ekonomi Produkti (UEP) LKKS dengan capaian kinerja berupa bimtek 2 kali dan bantuan UEP LKKS 4 orang.

III. Program Rehabilitasi Sosial

1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 83.000.000 dan realisasi keuangan Rp 82.575.714 atau 99.49 % serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah bantuan permakanan bagi Lanjut Usia terlantar dan Anak terlantar dengan capaian kinerja berupa 100 orang.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang dengan alokasi anggaran sebesar Rp 28.480.000 dan realisasi keuangan Rp 25.691.911 atau 90.21 % serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah bantuan sandang bagi Lanjut Usia terlantar, Anak terlantar, Penyandang Disabilitas dan Gelandangan Pengemis dengan capaian kinerja berupa 12 orang.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 29.090.000 dan realisasi keuangan Rp 25.355.628 atau 87.16 % serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah bantuan alat bantu bagi Lanjut Usia terlantar, anak terlantar, Penyandang Disabilitas dan Gelandangan Pengemis dengan capaian kinerja berupa 18 orang.
- d. Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga dengan alokasi anggaran sebesar Rp 27.826.000 dan realisasi keuangan Rp 25.357.314 atau 91.13 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah advokasi dan pendampingan anak berhadapan dengan hukum dengan capaian kinerja berupa 61 orang.
- e. Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp 837.750.000 dan realisasi keuangan Rp 814.375.266 atau 97.21 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah bantuan permakanan bagi Lanjut Usia terlantar dan lansia potensial, alat bantu bagi Lanjut Usia dan Disabilitas dengan capaian kinerja berupa 894 orang yang terdiri dari bantuan permakanan 891 orang, Alat Bantu Lanjut Usia 2 Orang dan Alat bantu Disabilitas 1 Orang.
- f. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 29.343.000 dan realisasi keuangan Rp 25.307.200 atau 86.25 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Lanju Usia terlantar, Anak terlantar, Penyandang Disabilitas, Gelandangan dan Pengemis mendapatkan layanan rujukan kewenangan Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja berupa 25 Orang.

2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.

- a. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp 463.959.900 dan realisasi keuangan Rp 429.567.237 atau 92.59 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja berupa 94 Orang yaitu bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).

- b. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA dengan alokasi anggaran sebesar Rp 872.994.900 dan realisasi keuangan Rp 864.819.325 atau 99.06 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Fakir Miskin dengan capaian kinerja berupa 181 Orang.
- c. Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp 32.005.000 dan realisasi keuangan Rp 24.038.646 atau 75.11 % serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja berupa 10 orang,

IV. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

1. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp 39.988.400 dan realisasi keuangan Rp 39.771.546 atau 99.46 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota yang didata dengan capaian kinerja berupa 251.846 orang.
- b. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan alokasi anggaran sebesar Rp 330.576.700 dan realisasi keuangan Rp 325.712.463 atau 98.53 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan Kabupaten/ Kota dengan capaian kinerja berupa 21.958 Keluarga, jumlah kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) 2 kegiatan dan jumlah penyediaan rompi lapangan PKH, PSM dan TSKS sebanyak 164 stel.

V. Program Penanganan Bencana

1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 215.522.728 dan realisasi keuangan Rp 180.698.304 atau 83.84 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Penyediaan Makanan untuk korban bencana dengan capaian kinerja berupa 228 orang.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang dengan alokasi anggaran sebesar Rp 187.944.000 dan realisasi keuangan Rp 186.469.764 atau 99.22 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Penyediaan Sandang untuk korban bencana dengan capaian kinerja berupa 150 orang.

- c. Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 16.420.000 dan realisasi keuangan Rp 4.175.000 atau 25.43 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan yaitu Mayat terlarat dan orang terlarat dalam perjalanan dengan capaian kinerja 0 mayat terlarat dan 9 orang terlarat.
- d. Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial dengan alokasi anggaran sebesar Rp 75.679.900 dan realisasi keuangan Rp 74.039.098 atau 97.83 % serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan Kabupaten/ Kota dengan capaian kinerja sebanyak 50 Orang.

VI. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

1. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp 20.000.000 dan realisasi keuangan Rp 19.500.000 atau 97.50% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Peringatan Hari Pahlawan 10 November dengan capaian kinerja berupa 1 kali peringatan.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	DINAS SOSIAL	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial		I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota				
				1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
				a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/Bulan	37 Orang/Bulan		
				2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 Paket	6 Paket		
				b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket		
				c. Sub Kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	12 Paket		
				d. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan		
				e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	40 Laporan		
				3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	2 Unit		
				4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan		

NO	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	5 Unit		
				b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	2 Unit		
				c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit		
				II. Program Pemberdayaan Sosial				
				1. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota				
				a. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	80 Orang PSM	80 Orang PSM		
				b. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Orang TKSK	13 Orang TKSK		
				c. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Kali Bimtek LKKS dan 4 Orang Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) LKKS	2 Kali Bimtek LKKS dan 4 Orang Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) LKKS		

NO	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				III. Program Rehabilitasi Sosial				
				1. Kegiatan rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
				a. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Bantuan Permakanan : - 80 Orang Lanjut Usia terlantar - 20 Orang anak terlantar	Bantuan Permakanan : - 80 Orang Lanjut Usia terlantar - 20 Orang anak terlantar		
				b. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Bantuan Sandang : - 3 Orang Lanjut Usia - 3 Orang Anak Terlantar - 4 Orang Disabilitas - 2 Orang Gelandangan dan Pengemis	Bantuan Sandang : - 3 Orang Lanjut Usia - 3 Orang Anak Terlantar - 4 Orang Disabilitas - 2 Orang Gelandangan dan Pengemis		
				c. Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Bantuan Alat Bantu : - 5 Orang Lanjut Usia - 3 Orang Anak Terlantar - 8 Orang Disabilitas - 2 Orang Gelandangan dan Pengemis	Bantuan Alat Bantu : - 5 Orang Lanjut Usia - 3 Orang Anak Terlantar - 8 Orang Disabilitas - 2 Orang Gelandangan dan Pengemis		
				d. Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	50 orang Advokasi dan Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum	61 orang Advokasi dan Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum		
				e. Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	891 Orang Bantuan Permakanan Lanjut Usia, 2 Orang Bantuan Alat Bantu bagi Lanjut Usia dan 1 Orang Bantuan	891 Orang Bantuan Permakanan Lanjut Usia, 2 Orang Bantuan Alat Bantu bagi Lanjut Usia dan 1 Orang Bantuan		

NO	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					bagi Disabilitas	bagi Disabilitas		
				f. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Layanan Rujukan : - 2 Orang Lanjut Usia - 15 Orang Anak Terlantar - 6 Orang Disabilitas - 2 Orang Gelandangan dan pengemis	Layanan Rujukan : - 2 Orang Lanjut Usia - 15 Orang Anak Terlantar - 6 Orang Disabilitas - 2 Orang Gelandangan dan pengemis		
				2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				
				a. Sub Kegiatan Pemberian Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	94 Orang Bantuan Usaha Ekonomi Produkti (UEP) bagi Wanuta Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	94 Orang Bnatuan Usaha Ekonomi Produkti (UEP) bagi Wanuta Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)		
				b. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	181 Orang Bantuan Usaha Ekonomi Produkti (UEP) bagi Fakir Miskin	181 Orang Bantuan Usaha Ekonomi Produkti (UEP) bagi Fakir Miskin		
				c. Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	10 Orang	10 Orang		
				IV. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				
				1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				

NO	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				a. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	251,846 Orang	251,846 Orang		
				b. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	21.958 Orang, 2 Kegiatan Rakor PKH dan 164 Stel Rompi Lapangan PKH,PSM dan TSKS	21.958 Orang, 2 Kegiatan Rakor PKH dan 164 Stel Rompi Lapangan PKH,PSM dan TSKS		
				V. Program Penanganan Bencana				
				1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				
				a. Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	190 Orang Permakanan untuk Korban Bencana	228 Orang Permakanan untuk Korban Bencana		
				b. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	150 Orang Sandang Untuk Korban Bencana	150 Orang Sandang Untuk Korban Bencana		
				c. Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	2 Mayat terlantar 9 Orang Orang Terlantar	0 Mayat terlantar 9 Orang Orang Terlantar		
				d. Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	50 Orang	50 Orang		
				VI. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan				
				2. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				
				a. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Kali Peringatan Hari 10 November	1 Kali Peringatan Hari 10 November		

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Secara umum pelaksanaan program, Kegiatan dan Sub kegiatan urusan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.
- b. Kegiatan yang tidak mencapai target sebagai berikut:
 1. Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan. Tidak tercapainya target yang telah ditetapkan pada Perjanjian kinerja disebabkan Karena tidak adanya penanganan terhadap mayat terlantar selama tahun 2024.

D. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan Urusan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain :

1. Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Program Penanganan Bencana. Realisasi keuangan pada sub kegiatan ini sebesar 25.43 %, hal ini disebabkan Karena tidak adanya penanganan mayat terlantar selama tahun 2024 dan tidak adanya pemulangan orang terlantar ke luar Provinsi Sumatera Barat.

Beberapa solusi dan saran yang dapat dilakukan untuk menjawab permasalahan tersebut di atas adalah :

1. Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Program Penanganan Bencana Kota, kegiatan ini akan terlaksana apa bila ada mayat terlantar pada tahun 2024 dan pemulangan orang terlantar ke luar Provinsi Sumatera Barat.

**PRESTASI DAN PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021-2024**

NO	NAMA PRESTASI/ PENGHARGAAN	TAHUN PENGHARGAAN	TINGKAT PROVINSI	TINGKAT NASIONAL	DOKUMENTASI
1.	Terbaik I Tingkat Provinsi Sumatera Barat dalam penilaian potensi sumber kesejahteraan sosial (Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan)	2022	√		 
2.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik Penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP) Tahun 2023	2023		√	
3.	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023	2023		√	
4.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik Penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP) Tahun 2024	2024		√	
5.	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024	2024		√	